



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 – 2024



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	II-13
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	II-17
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...	III-2
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati..	III-4
Tabel 3.3.	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah	III-9
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-14
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1.	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	VI-7
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	VII-2
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	VII-3

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Magelang II-10

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Dinas Pertanian dan Pangan) Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (Dinas Pertanian dan Pangan), serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Kota Mungkid,

2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG

Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660618 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Renstra merupakan dasar penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama lima tahun. Renstra berfungsi pula sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Akhir kata semoga dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini dapat bermanfaat. Dengan dukungan penuh dari segenap pelaku, pengguna dan pemangku kepentingan diharapkan Renstra ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid,

2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG



Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660618 199703 1 004

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini antara lain berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan, kelembagaan petani yang masih lemah, adanya pasar bebas di era globalisasi, dan harga jual produk pertanian yang tidak merata (fluktuatif).

yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 359 juga disebutkan tentang Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Awal tahun 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD terjadi pandemi Covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global dan regional, termasuk Kabupaten Magelang. Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan kasus positif Covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020, dan di Kabupaten Magelang kasus positif Covid-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 15 Maret 2020. Sampai dengan saat ini kasus Covid-19 terkonfirmasi masih menyebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kejadian pandemi Covid-19 berdampak pada tekanan krisis multisektor akibat penyebaran yang luas dan cepat dari tingkat global hingga domestik. Tidak hanya pada sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas dilakukan proses evaluasi terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dengan hasil rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Magelang, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Selain itu terdapat keterkaitan antara Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Renstra ini kemudian dijabarkan dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan pelaksanaan pencapaian target, program dan kegiatan tahunan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati Magelang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang Pangan. Untuk mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya, maka Distan dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai tujuan dan sasaran strategis, komprehensif, terpadu dan terarah. Renstra disusun sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi kemampuan daerah.

1. 2. Landasan Hukum

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
30. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
45. Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
46. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan di bidang pertanian dan pangan, selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kementerian Pertanian.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) Distan dan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Distan dan Pangan akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Sub Bagian serta 5 orang Kepala Bidang dan 15 orang Kepala Seksi, yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
4. Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
6. Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD).
9. Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

10. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi bidang pertanian dan pangan;
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
13. Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan;
14. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
15. Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan;
16. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program;
17. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan budidaya dan pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura;

3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis budidaya serta pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Menyelenggarakan pembinaan penggunaan pupuk, pestisida, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman dan pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
6. Menyelenggarakan uji multilokasi varietas/klon, pemupukan, pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman, dan Pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
7. Menyelenggarakan pengamatan, peramalan, kerja sama penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
8. Memfasilitasi standarisasi penggunaan pupuk dan pestisida komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
9. Menyelenggarakan pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pemasaran komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
10. Melaksanakan administrasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
11. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perkebunan

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Perkebunan;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan budidaya dan pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis budidaya serta pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Menyelenggarakan pembinaan penggunaan pupuk, pestisida, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman dan pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
6. Menyelenggarakan uji varietas/klon, kesuburan tanah dan pemupukan, pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman, dan Pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
7. Menyelenggarakan pengamatan, peramalan, kerja sama penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
8. Mengoordinasikan penggunaan pupuk dan pestisida komoditi tanaman perkebunan;
9. Mengoordinasikan pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pemasaran komoditi tanaman perkebunan;
10. Melaksanakan administrasi di bidang perkebunan;
11. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup bidang perkebunan;
12. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup bidang perkebunan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana dan sarana pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan bidang prasarana dan sarana;
3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang prasarana dan sarana;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan lahan dan air serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pendayagunaan alat mesin dan pembiayaan pertanian;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di sektor pertanian;
9. Melaksanakan administrasi di bidang prasarana dan sarana;
10. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyuluhan dan SDM Pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan bidang penyuluhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;

3. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
4. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
5. Menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
6. Menyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
7. Menyelenggarakan promosi pertanian;
8. Melaksanakan administrasi di bidang penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
9. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Pangan

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
2. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang ketahanan pangan;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penguatan ketahanan pangan;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Merumuskan analisis ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan pangan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan;

7. Melaksanakan pengawasan distribusi dan keamanan pangan;
8. Menyelenggarakan penganeekaragaman konsumsi pangan;
9. Mengembangkan distribusi, cadangan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan;
10. Menyelenggarakan kerjasama ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
11. Menyelenggarakan pembinaan ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
12. Melaksanakan administrasi di Bidang Ketahanan Pangan;
13. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Ketahanan Pangan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Pangan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Pangan, (Distan dan Pangan) Kabupaten Magelang.

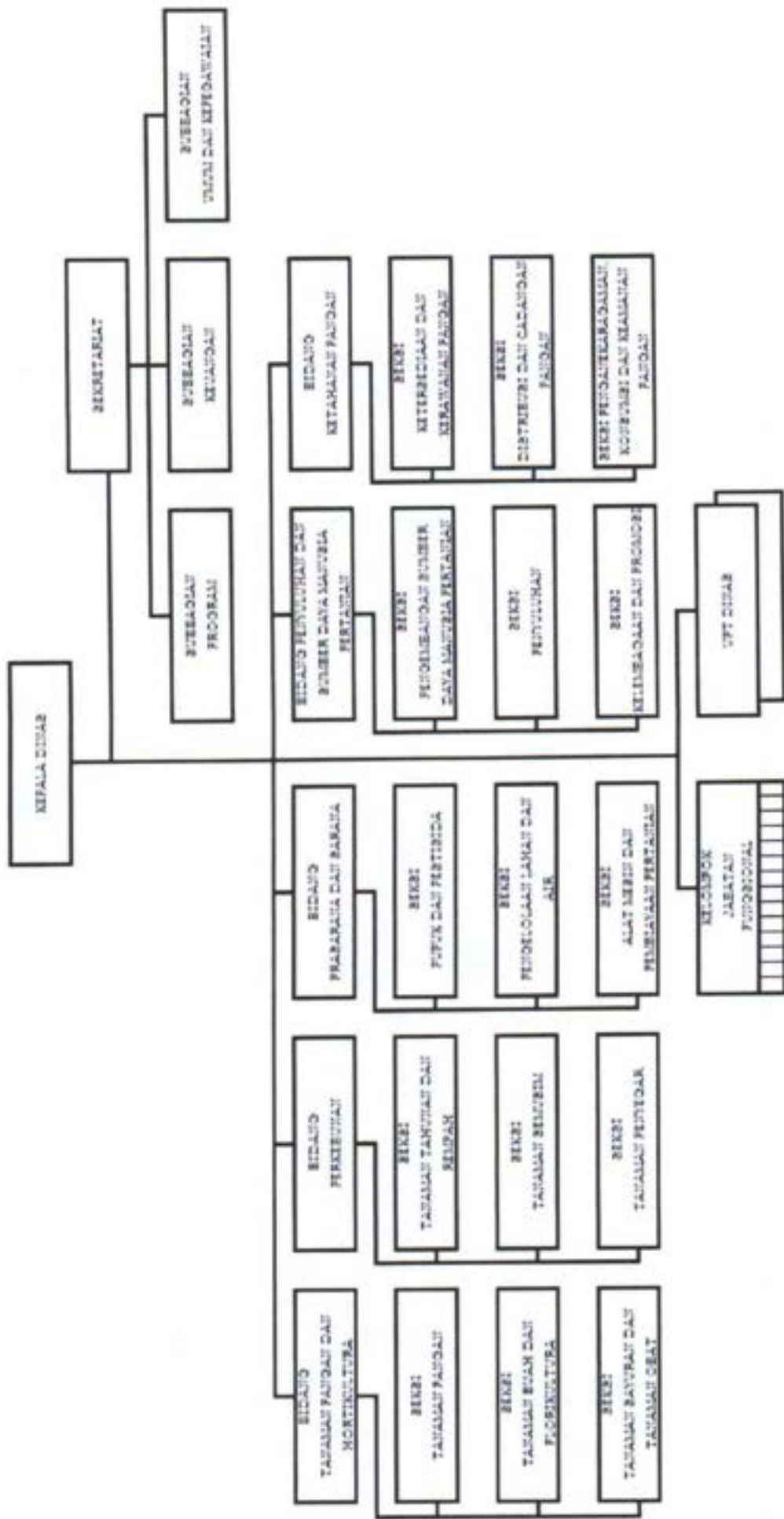
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - 2.a. Sub Bagian Program
 - 2.b. Sub Bagian Keuangan
 - 2.c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 3.a. Seksi Tanaman Pangan
 - 3.b. Seksi Tanaman Buah dan Florikultura
 - 3.c. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

4. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 4.a. Seksi Tanaman Tahunan dan Rempah
 - 4.b. Seksi Tanaman Semusim
 - 4.c. Seksi Tanaman Penyegar
5. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 5.a. Seksi Pupuk dan Pestisida
 - 5.b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - 5.c. Seksi Alat Mesin dan Pembiayaan
6. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahi :
 - 6.a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 6.b. Seksi Penyuluhan
 - 6.c. Seksi Kelembagaan dan Promosi
7. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 7.a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 7.b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 7.c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang seperti gambar di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang maka diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan prasarana dan sarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Komposisi SDM Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan eselon sejumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon IV : 20 orang
- b. Komposisi SDM Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan jabatan sejumlah 302 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Jabatan Struktural : 26 orang
 - Jabatan Fungsional : 107 orang
 - Jabatan Fungsional Umum : 23 orang
 - Tenaga Harian Lepas Penyuluh Bantu (non PNS) : 102 orang
- c. Komposisi SDM PNS Dinas Pertanian dan Pangan sesuai jenjang pendidikan sejumlah 196 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Pasca sarjana (S.2) : 12 orang
 - Sarjana (S.1 / D.4) : 90 orang
 - Diploma 3 / Akسدemi : 17 orang
 - SLTA : 32 orang
 - SLTP : 5 orang
 - SD : 0 orang
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan :
 - Kendaraan Dinas
 - Kendaraan roda 4 : 5 unit
 - Kendaraan roda 2 : 128 unit
 - Inventaris Kantor
 - Komputer : 39 unit
 - Laptop : 74 unit
 - LCD proyektor : 20 unit
 - Mesin ketik : 18 unit
 - Printer : 87 unit
 - Telepon : 2 unit

- Faximile : 1 unit
- AC : 18 unit
- Pengeras suara (*wireless*) : 20 unit
- Perlengkapan Kantor
 - Meja kerja : 290 unit
 - Kursi : 208 unit
 - Meja dan kursi tamu : 12 unit
 - Meja rapat : 44 unit
 - Kursi rapat : 645 unit
- Gedung : 11 unit
- Asrama dan Ruang Belajar : 1 unit
- Gudang Pangan : 2 unit
- Kebun Dinas
 - Kaponan (Pakis) : 21.280 m²
 - Diwak (Tegalrejo) : 31.680 m²
 - Banjarnegara (Mertoyudan) : 1.880 m²
 - Lahan percontohan (Srowol): 7.000 m²

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2014 – 2018 tercantum dalam Tabel 2.5. berikut ini :
(ada)

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Indeks Ketahanan Pangan	√	√	√	78,42 angka (0-100)	79,47 angka (0-100)	80,52 angka (0-100)	81,57 angka (0-100)	82,62 angka (0-100)	82,62 angka (0-100)	79,51 angka (0-100)	96,24
1	Ketersediaan pangan utama (beras)	√	√	√	211,22 kg/jiwa/th	210,66 kg/jiwa/th	210,10 kg/jiwa/th	209,55 kg/jiwa/th	208,99 kg/jiwa/th	208,99 kg/jiwa/th	205,82 kg/jiwa/th	98,48
2	Stabilitas harga pangan	√	√	√	93,97%	93,98%	94%	94,15%	94,30%	94,30%	93,20%	98,83
3	Skor Pola Pangan Harapan	√	√	√	87,98%	88%	88,10%	88,25%	88,40%	88,40%	87,90%	99,89
a.	Ketersediaan energi per kapita	√	√	√	2000 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	2673 Kkal	133,65
b.	Ketersediaan protein per kapita	√	√	√	53 gram	53 gram	53 gram	53 gram	53 gram	53 gram	71,59 garm	135,45
c.	Penguatan cadangan pangan	√	√	√	65%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	100
d.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	√	√	√	87,9 indeks	88,2 indeks	88,4 indeks	88,6 indeks	88,8 indeks	88,8 indeks	87,9 indeks	98,99
e.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	√	√	√	90%	90%	90%	90%	90%	90%	93%	103,33
f.	Penanganan daerah rawan pangan	√	√	√	67,50%	67,50%	67,50%	67,50%	67,50%	67,50%	67,50%	100
g.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	√	√	√	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%	100
h.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	√	√	√	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%	100
II	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	√	√	√	7.373,16 milyar rupiah	7.748,63 milyar rupiah	8.124,10 milyar rupiah	8.499,56 milyar rupiah	8.875,03 milyar rupiah	8.875,03 milyar rupiah	6.914,81 milyar rupiah	77,91
1	Produksi Padi	√	√	√	478.500 ton (GKP)	479.000 ton (GKP)	479.500 ton (GKP)	480.000 ton (GKP)	480.500 ton (GKP)	480.500 ton (GKP)	409.159 ton (GKP)	85,15

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Produksi Jagung			√	51.450 ton (pipilan kering)	51.500 ton (pipilan kering)	51.550 ton (pipilan kering)	51.600 ton (pipilan kering)	51.650 ton (pipilan kering)	51.650 ton (pipilan kering)	44.040 ton (pipilan kering)	85,27
3	Produksi cabai			√	39.457 ton (segar)	40.071 ton (segar)	40.399 ton (segar)	40.783 ton (segar)	41.183 ton (segar)	41.183 ton (segar)	40.872 ton (segar)	99,24
4	Produksi bawang putih			√	2.264,0 ton (askip)	2.377,2 ton (askip)	2.424,7 ton (askip)	2.473,2 ton (askip)	2.522,7 ton (askip)	2.522,7 ton (askip)	7.754 ton (askip)	307,37
5	Produksi kopi			√	1.490 ton (ose kering)	1.500 ton (ose kering)	1.510 ton (ose kering)	1.520 ton (ose kering)	1.530 ton (ose kering)	1.530 ton (ose kering)	1490,7 ton (ose kering)	97,43
6	Produksi cengkeh			√	165 ton (bunga kering)	167 ton (bunga kering)	169 ton (bunga kering)	171 ton (bunga kering)	173 ton (bunga kering)	173 ton (bunga kering)	165,7 ton (bunga kering)	95,72
7	Produksi kelapa dalam			√	7.530 ton (kopra)	7.535 ton (kopra)	7.540 ton (kopra)	7.545 ton (kopra)	7.550 ton (kopra)	7.550 ton (kopra)	7531 ton (kopra)	99,75
8	Produksi satek			√	69.380 ton (segar)	69.390 ton (segar)	69.400 ton (segar)	69.410 ton (segar)	69.420 ton (segar)	69.420 ton (segar)	94619 (ton) segar	136,30
9	Produksi jeruk			√	2.655 kuintal (segar)	2.660 kuintal (segar)	2.665 kuintal (segar)	2.670 kuintal (segar)	2.675 kuintal (segar)	2.675 kuintal (segar)	3.791 kuintal (segar)	141,72
10	Produksi kelengkeng			√	93 ton (segar)	95 ton (segar)	97 ton (segar)	99 ton (segar)	100 ton (segar)	100 ton (segar)	95,00 ton (segar)	95,00
11	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi			√	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,12%	74,67
a.	Produktivitas padi			√	60,2 kw/ha	60,3 kw/ha	60,4 kw/ha	60,5 kw/ha	60,6 kw/ha	60,6 kw/ha	62,5 kw/ha	103,14
b.	Produktivitas jagung			√	59,31 kw/ha	59,32 kw/ha	59,33 kw/ha	59,34 kw/ha	59,35 kw/ha	59,35 kw/ha	66,1 kw/ha	111,37
c.	Produktivitas kopi			√	8,95 kw/ha	9,00 kw/ha	9,05 kw/ha	9,10 kw/ha	9,15 kw/ha	9,15 kw/ha	8,86 kw/ha	96,83
d.	Produktivitas cabai			√	69,80 kw/ha	69,85 kw/ha	69,90 kw/ha	69,96 kw/ha	70,01 kw/ha	70,01 kw/ha	66,3 kw/ha	94,70
e.	Produktivitas bawang putih			√	61,57 kw/ha	61,72 kw/ha	61,87 kw/ha	62,02 kw/ha	62,18 kw/ha	62,18 kw/ha	70,62 kw/ha	113,57
f.	Produktivitas cengkeh			√	1,86 kw/ha	1,92 kw/ha	1,98 kw/ha	2,04 kw/ha	2,08 kw/ha	2,08 kw/ha	1,80 kw/ha	86,54
g.	Produktivitas kelapa dalam			√	14,50 kw/ha	14,60 kw/ha	14,70 kw/ha	14,80 kw/ha	14,90 kw/ha	14,90 kw/ha	14,50 kw/ha	97,32

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
h.	Produktivitas salak			√	0,06 kw/pohon	0,07 kw/pohon	0,08 kw/pohon	0,09 kw/pohon	0,10 kw/pohon	0,10 kw/pohon	0,07 kw/ha	70,00
i.	Produktivitas jeruk			√	0,10 kw/pohon	0,12 kw/pohon	0,14 kw/pohon	0,16 kw/pohon	0,18 kw/pohon	0,18 kw/pohon	0,11 kw/ha	61,11
j.	Produktivitas kelengkeng			√	0,78 kw/pohon	0,79 kw/pohon	0,80 kw/pohon	0,81 kw/pohon	0,82 kw/pohon	0,82 kw/pohon	0,79 kw/ha	96,34
k.	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang terjalin			√	20%	20%	20%	20%	20%	100%	16,67%	83,35
l.	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik			√	5,01%	5,45%	5,89%	6,32%	6,76%	6,76%	5,82%	86,09
m.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan			√	3,45%	3,59%	3,79%	3,83%	3,86%	18,52%	4,57%	24,68
n.	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani			√	36,25%	37,60%	40,01%	42,15%	44,50%	44,50%	36,22%	108,12

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dalam urusan pertanian, dan ketahanan pangan beberapa indikator kinerja dijadikan sebagai indikator keberhasilan pelayanan Perangkat Daerah. Selama kurun waktu 2019 – 2020, sebanyak 34 indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah terhadap target akhir renstra yang capaiannya $\geq 80\%$ yaitu pada indikator :
 - 1) Indeks Ketahanan Pangan
 - 2) Ketersediaan Pangan Utama (Beras)
 - 3) Stabilitas Harga Pangan
 - 4) Skor Pola Pangan Harapan
 - 5) Produksi Padi
 - 6) Produksi Jagung
 - 7) Produksi Cabai
 - 8) Produksi Bawang Putih
 - 9) Produksi Kopi
 - 10) Produksi Cengkeh
 - 11) Produksi Kelapa Dalam
 - 12) Produksi Salak
 - 13) Produksi Jeruk
 - 14) Produksi Kelengkeng
2. Tingkat capaian indikator program perangkat daerah terhadap target akhir renstra yang capaiannya $\geq 80\%$ yaitu pada indikator :
 - 1) Ketersediaan energi per kapita
 - 2) Ketersediaan protein perkapita
 - 3) Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 - 4) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
 - 5) Penanganan daerah rawan pangan
 - 6) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
 - 7) Stabilitas harga dan pasokan pangan
 - 8) Produktivitas padi
 - 9) Produktivitas Jagung
 - 10) Produktivitas Cabai
 - 11) Produktivitas Bawang Putih
 - 12) Produktivitas Kopi
 - 13) Produktivitas Kelapa Dalam
 - 14) Produktivitas Kelengkeng
3. Tingkat capaian indikator tujuan, sasaran dan program perangkat daerah terhadap target akhir renstra yang capaiannya $\leq 80\%$ yaitu pada indikator :
 - 1) Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
 - 2) Persentase produk pertanian yang terstandarisasi
 - 3) Produktivitas cengkeh
 - 4) Produktivitas salak
 - 5) Produktivitas jeruk
 - 6) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana terinci pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Uraian	Anggaran Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(1)												
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.334.271.850	1.314.271.850	1.319.271.850	1.334.271.850	1.324.271.850	1.332.121.246	1.005.042.770	99,84	76,47	(2.500.000)	(327.078.476)	
Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	85.000.000	65.000.000	70.000.000	85.000.000	75.000.000	85.000.000	30.681.000	100,00	47,20	(2.500.000)	(54.319.000)	
Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	5.000.000	100,00	2,00	-	(245.000.000)	
Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	199.900.000	200.000.000	99,95	100,00	-	100.000	
Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	72.849.495	-	97,13	-	-	(72.849.495)	
Peningkatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	515.000.000	100,00	128,75	-	115.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	69.495.000	100,00	46,33	-	(80.505.000)	
Pengembangan Ciptaan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBH-CHT)	174.271.850	174.271.850	174.271.850	174.271.850	174.271.850	174.271.850	184.866.770	100,00	106,08	-	10.594.920	
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	1.417.750.000	1.417.750.000	1.417.750.000	1.417.750.000	1.417.750.000	1.417.750.000	1.049.756.970	100,00	74,04	-	(367.993.030)	
Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	56.100.000	100,00	95,90	-	(2.400.000)	

Uraian	Anggaran Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)													
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	155.200.000	100,00	103,47	-	-	-	5.200.000
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	59.250.000	59.250.000	59.250.000	59.250.000	59.250.000	59.250.000	29.760.000	100,00	50,23	-	-	-	(29.490.000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	173.502.580	100,00	86,75	-	-	-	(26.497.420)
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas /Gedung Pemerintah Lainnya	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	596.939.390	100,00	66,33	-	-	-	(303.060.610)
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	38.255.000	100,00	76,51	-	-	-	(11.745.000)
Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.576.000	102.576.000	102.576.000	102.576.000	102.576.000	102.576.000	126.670.000	100,00	123,49	-	-	-	24.094.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72.576.000	72.576.000	72.576.000	72.576.000	72.576.000	72.576.000	50.000.000	100,00	68,89	-	-	-	(22.576.000)

Uraian	Anggaran Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.520.000	100,00	85,20	-	(1.480.000)	
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	60.000.000	100,00	600,00	-	50.000.000	
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.150.000	100,00	81,50	-	(1.850.000)	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	3.310.609.000	3.312.609.000	3.314.609.000	3.316.609.000	3.318.609.000	2.954.715.500	779.662.185	89,25	23,54	2.000.000	(2.175.053.315)	
Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	20.000.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	20.000.000	9.449.860	100,00	42,95	2.000.000	(10.550.140)	
Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	269.000.000	-	57,80	-	-	(289.000.000)	
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	100,00	-	-	(350.000.000)	
Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	100,00	-	-	(350.000.000)	
Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	105.106.500	-	52,55	-	-	(105.106.500)	
Pengembangan Benih Tanaman Unggul	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	90.930.000	100,00	45,47	-	(109.070.000)	
Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	73.345.000	66,67	48,90	-	(26.655.000)	

Uraian	Anggaran Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	100,00	-	-	(500.000.000)	
Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	740.609.000	740.609.000	740.609.000	740.609.000	740.609.000	740.609.000	303.737.325	100,00	41,01	-	(436.871.675)	
Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	302.200.000	100,00	100,73	-	2.200.000	
Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	2.470.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	2.470.000.000	1.869.277.000	937.359.435	75,68	37,95	-	(931.917.565)	
Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-	100,00	-	-	(400.000.000)	
Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	30.000.000	-	15,00	-	-	(30.000.000)	
Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	100,00	-	-	(250.000.000)	
Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT)	495.000.000	495.000.000	495.000.000	495.000.000	495.000.000	495.000.000	296.422.110	100,00	59,88	-	(198.577.890)	
Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	249.277.000	-	99,71	-	-	(249.277.000)	
Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	80,00	80,00	-	-	
Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	25.000.000	15.000.000	5,56	3,33	-	(10.000.000)	
Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	303.737.325	100,00	151,87	-	103.737.325	

Uraian	Anggaran Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	302.200.000	100,00	151,10	-	102.200.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	8.055.267.150	8.055.267.150	8.055.267.150	8.055.267.150	8.055.267.150	7.573.517.334	27.495.480.080	94,02	341,34	-	19.921.962.746		
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	100,00	-	-	(65.000.000)		
Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	1.643.000.000	1.643.000.000	1.643.000.000	1.643.000.000	1.643.000.000	1.643.000.000	-	100,00	-	-	(1.643.000.000)		
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian (DAK)	4.875.999.816	4.875.999.816	4.875.999.816	4.875.999.816	4.875.999.816	4.342.250.000	4.651.509.273	89,05	95,40	-	309.259.273		
Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	645.267.334	645.267.334	645.267.334	645.267.334	645.267.334	714.767.334	21.675.800.000	110,77	3.359,20	-	20.961.032.666		
Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	65.844.942	100,00	43,90	-	(84.155.058)		
Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	100,00	-	-	(50.000.000)		
Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	482.500.000	1.062.088.365	96,50	212,42	-	579.588.365		
Pembayaan Pertanian	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	40.237.500	100,00	31,93	-	(85.762.500)		
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	1.401.250.000	1.401.250.000	1.401.250.000	1.401.250.000	1.401.250.000	1.401.250.000	735.511.970	100,00	52,49	-	(665.738.030)		
Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	100,00	-	-	(300.000.000)		

Uraian	Anggaran Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2020	2021	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Program dan Program Penyuluhan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	100,00	-	-	-	-	-	(150.000.000)
Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	100,00	-	-	-	-	-	(200.000.000)
Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	151.250.000	151.250.000	151.250.000	151.250.000	151.250.000	151.250.000	635.511.970	100,00	420,17	-	-	-	-	484.261.970
Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	499.999.935	-	100,00	-	-	-	-	-	(499.999.935)
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembaku (DBHCHT)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024 terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 terdapat keterkaitan antara capaian sasaran indikator kinerja dengan berbagai tantangan dan peluang.

Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Laju alih fungsi lahan yang semakin besar.
2. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani.
3. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal.
4. Masuknya komoditi pertanian impor yang menyaingi produk petani.
5. Makin berkurangnya minat generasi muda yang mau bekerja pada bidang pertanian.
6. Semakin tingginya persaingan produk pertanian mengharuskan adanya peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian melalui penerapan teknologi yang berkembang, dan produksi pertanian aman yang dikonsumsi.
7. Perubahan iklim yang memicu bencana dan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Adapun peluang yang dapat mendukung pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Distan dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. SDM pertanian baik petani maupun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang bekerja sebagai petani adalah peluang pengembangan pertanian, melalui pembinaan yang intensif, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kursus, bimbingan teknis, magang dan sekolah lapang.
2. Meningkatnya kebutuhan akan hasil produksi pangan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat merupakan peluang bagi pemenuhan akan kebutuhan pangan masyarakat.
3. Agroklimat Kabupaten Magelang yang sesuai untuk budi daya pertanian merupakan peluang yang harus didukung dengan ketersediaan fungsi sarana dan prasarana pertanian perkebunan guna meningkatkan fungsi lahan pertanian.
4. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk pertanian.
5. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah lingkungan.
6. Opimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan saptata usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.

Hasil Telaahan terhadap RTRW :

Telaahan struktur ruang wilayah meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dengan mengembangkan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan pelayanan terminal agribisnis yang terintegrasi dengan pusat kawasan agropolitan maupun pusat kawasan budi daya pertanian/perkebunan. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Kaliangkrik sebagai pusat penghasil produk sayuran, Kecamatan Pakis dan Ngablak sebagai penghasil tanaman sayuran dan bunga, Kecamatan Dukun sebagai pusat perdagangan hasil pertanian kawasan agropolitan Merapi-Merbabu (STA Sewukan), Kecamatan

Grabag sebagai sentra produksi kopi dan Kecamatan Salam sebagai pusat pemasaran hasil pertanian skala regional antar kabupaten dan nasional antar provinsi. Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Magelang.

Sistem prasarana lainnya berupa sistem jaringan sumber daya air dengan melakukan konservasi lahan di daerah tangkapan air baik secara vegetasi maupun sipil teknis antara lain sumur resapan, embung, serta partisipasi masyarakat dalam konservasi lahan. Pengembangan jaringan irigasi dengan peningkatan jaringan irigasi teknis, setengah teknis dan sederhana untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengoptimalkan jaringan irigasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan air di lahan sawah yang tidak dilayani dengan irigasi teknis.

Pola ruang Kabupaten Magelang secara umum terdiri dari kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, kawasan yang menjadi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah kawasan budi daya yang meliputi kawasan budi daya pertanian, kawasan budi daya hutan rakyat, dan kawasan budi daya perkebunan. Pembangunan Kabupaten Magelang tengah dilakukan langkah-langkah penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program sebagai upaya memantapkan produktivitas pertanian khususnya padi di wilayah Kabupaten Magelang sebagai pilar penyangga pangan diperlukan kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam menentukan kebijakan pengembangan wilayah agar memperhatikan potensi lahan yang harus dipertahankan dan yang boleh dialihfungsikan untuk pengembangan wilayah.

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi. Adapun yang termasuk dalam kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai untuk budi daya tanaman tahunan, termasuk kawasan yang telah dikembangkan tanaman keras baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Pertimbangan penetapan alokasi ruang untuk kegiatan perkebunan adalah:

1. Kesesuaian lahan untuk jenis tanaman perkebunan dan tanaman tahunan;
2. Kondisi perkebunan yang telah berkembang.

Wilayah yang termasuk kawasan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak. Pemanfaatan kawasan perkebunan di Kabupaten Magelang diatur dengan :

1. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

2. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing.

Hasil Telaahan terhadap KLHS :

Hasil telaah terhadap kajian lingkungan hidup strategis adalah munculnya pengaruh lingkungan sebagai berikut :

1. Pengelolaan lahan yang berlebihan karena penggunaan sarana produksi yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan daya dukung lahan pertanian semakin menurun, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pembinaan yang intensif kepada petani untuk menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.
2. Penggunaan pupuk kimia, pestisida dan alat mesin pertanian dapat meningkatkan pencemaran lahan pertanian. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan sosialisasi tentang penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT dan SLPTT, memperbanyak penggunaan pupuk organik agensia hayati dan pestisida hayati, melakukan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan kebijakan dan strategi dalam membangun pertanian dan pangan di Kabupaten Magelang beberapa tahun ke depan memerlukan analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan dan berpengaruh dalam proses mencapai tujuan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Tujuan umum pembangunan pertanian dan pangan adalah meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan komoditas pertanian yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Magelang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta kebijakan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor demografi, lingkungan hidup, iklim, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang menjadi objek kebijakan (petani), pangsa pasar serta investor. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian yang dapat menyebabkan produksi dan produktivitas pertanian tidak tercapai sesuai yang diharapkan serta belum optimalnya pola kemitraan untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil pertanian. Di samping itu minat generasi muda untuk ikut berperan aktif di sektor pertanian semakin berkurang pada saat ini. Identifikasi permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang diuraikan dalam Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan
		Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat belum optimal	Masih rendahnya informasi pasokan, harga dan akses pangan
			Masih rendahnya cadangan pangan daerah
			Belum optimalnya pencapaian target konsumsi pangan masyarakat
		Kerawanan pangan masih terjadi di beberapa lokasi	Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan
		Lemahnya pengawasan keamanan pangan	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
2.	Belum optimalnya produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian yang memadai	Belum optimalnya pengawasan penggunaan sarana pertanian
			Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan
			Belum optimalnya pengembangan prasarana pertanian
			Belum optimalnya pembangunan prasarana pertanian
		Adanya ancaman bencana pertanian dalam peningkatan produksi pertanian	Belum optimalnya penanggulangan bencana pertanian
		masih kurangnya pelayanan dan pembinaan produsen sarana produksi pertanian	Belum optimalnya perizinan usaha pertanian
		Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Belum optimalnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan dalam pengembangan SDM pertanian
			Belum optimalnya peranan lembaga petani dalam peningkatan pendapatan petani

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)**". Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang **Sejahtera** dan berahlak mulia.
- 2) Meningkatkan **Daya Saing** Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang **Amanah**.

Dari visi dan misi tersebut dijabarkan dalam Dasa Cita Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- 1) Kehidupan beragama dan berahlak mulia
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM
- 6) Sarana dan prasarana publik
- 7) Lingkungan hidup
- 8) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- 9) Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
- 10) Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang **Sejahtera** dan berahlak mulia, serta misi ke-2 yaitu Meningkatkan **Daya Saing** Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. Sedangkan Program Prioritas Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan cita yang ke-4 yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan cita ke-5 yaitu Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Magelang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Telah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berahlak mulia	Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;			

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat-an Dinas Pertanian dan Pangan;</p> <p>6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p>	<p>Produksi bahan pangan non beras terbatas antara lain karena terbatasnya luas lahan produksi, teknologi budidaya dan pengolahannya</p>	<p>Komitmen seluruh jajaran SKPD dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan, untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah</p>	<p>Diversifikasi pangan masyarakat belum berjalan secara optimal</p>

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Misi 2 : Meningkatkan Daya Saling Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	<p>Kebutuhan pangan yang semakin meningkat</p> <p>Pendapatan petani masih rendah</p> <p>Masih rendahnya kerjasama/ kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah</p>	<p>Letak Kabupaten Magelang yang strategis, serta agroklimat yang mendukung sebagai sentra pertanian</p> <p>Pembinaan kelompok tani yang intensif untuk meningkatkan pendapatan petani</p> <p>Permintaan konsumen terhadap produk pertanian yang berkualitas semakin meningkat</p>	<p>Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian</p> <p>Masih sulitnya mengubah perilaku / kebiasaan petani dalam melakukan usaha taninya</p> <p>Kelompok tani masih enggan melakukan kemitraan karena keterbatasan modal</p>
	Program Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM				

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.</p>	<p>Adanya dukungan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat</p>	<p>Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang profesional, memiliki pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penguasaan dan penerapan teknologi</p>
			<p>Belum optimalnya SDM pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri</p>	<p>Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan pertanian</p>	<p>Jumlah penyuluh yang semakin berkurang karena purna tugas sehingga jangkauan penyuluhan pun makin berkurang..</p>

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota Lain

A. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Visi dari kementerian Pertanian yaitu :

Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Untuk menggapai visi tersebut Kementerian Pertanian memiliki 4 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Mewujudkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

B. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2023 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

D. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kcal/kapita/hari) dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Tabel 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;	Kebutuhan pangan yang semakin meningkat	Letak Kabupaten Magelang yang strategis, serta agroklimat yang mendukung sebagai sentra pertanian	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.	3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; 4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatian Dinas Pertanian dan Pangan; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;	Masih rendahnya kerjasama/ kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah	Permintaan konsumen terhadap produk pertanian yang berkualitas semakin meningkat	Kelompok tani masih enggan melakukan kemitraan karena keterbatasan modal
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional			Pendapatan petani masih rendah	Pembinaan kelompok tani yang intensif untuk meningkatkan pendapatan petani	Masih sulitnya mengubah perilaku/ kebiasaan petani dalam melakukan usaha taninya

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
4.	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian		<p>7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya</p>	Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.	Adanya dukungan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Sarana dan prasarana yang terbatas serta kualitas SDD profesional, pengetahuan keterampilan khususnya di penguasaan penerapan t
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan					
6.	Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman					

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan		Belum optimalnya SDM pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri	Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan pertanian.	Jumlah penyuluh yang semakin berkurang karena purna tugas sehingga jangkauan penyuluhan pun makin berkurang.
8.	Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah				
9.	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan budidaya merupakan ranah utama dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan. Pengembangan infrastruktur berupa jalan dan irigasi diharapkan dapat menjadi pendukung pengembangan sektor pertanian dan pangan di seluruh wilayah di Kabupaten Magelang berdasarkan kondisi topografis dan geografisnya. Tingginya tingkat alih fungsi lahan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan utama yang menjadi kendala dalam pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang adalah adanya pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian. Hal ini mengakibatkan lahan mengalami kerusakan sementara di sisi lain terdapat peningkatan permintaan konsumen atas produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal dikonsumsi. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembinaan kepada para petani tentang penggunaan sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan dan dilaksanakan standarisasi terhadap produk organik. Telaah RTRW dan KLHS secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW				
1.	Rencana kawasan budidaya pertanian dan perkebunan	<p>Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p>	Adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang.	Kebutuhan komoditas pertanian dan perkebunan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk	Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
B	Struktur Ruang RTRW	<p>b. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>c. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>d. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan;</p> <p>e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>f. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p>		<p>Komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah</p>	<p>Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW</p>

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	Sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah	g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	Belum optimalnya sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah	Komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW
2.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air		Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan irigasi pertanian		
II KLHS					
A					
Permasalahan dan Isu Strategis					
1.	Penduduk dengan asupan kalori di bawah standar minimum		Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, dan halal dikonsumsi	Standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.	Masih sulitnya mengubah perilaku/kebiasaan petani untuk mengelola lahan pertanian menuju pertanian organik
2.	Nilai tambah pertanian				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
B	Skenario dan Rekomendasi				
1	Penetapan LP2B dan didukung dengan rehabilitasi dan pembangunan sistem jaringan irigasi terutama untuk meningkatkan lahan tadah hujan menjadi lahan basah dengan sistem irigasi yang dapat mendukung produktivitas tahunan pertanian tanaman pangan		Penurunan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan		

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang meliputi analisis Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan.

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah.

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan di masyarakat maupun pemerintah.

5. **Konsumsi pangan masyarakat**
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman yang masih terbatas.
6. **Keamanan pangan segar**
Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar.
7. **Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.**
8. **Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air serta dampak perubahan iklim.**
9. **Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani.**
10. **Belum optimalnya infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.**
11. **Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian.**
12. **Masih lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan kerjasama/kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah.**
13. **Peranan SDM pertanian dan pemberdayaan penyuluhan dalam pengembangan pertanian belum optimal.**
14. **Masih rendahnya perlindungan terhadap petani.**

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2019-2024, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
- b. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Sasaran :

Sasaran pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan di masyarakat.
- b. Meningkatnya produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan.
- c. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian/ perkebunan.
- d. Tercukupinya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.
- e. Menngkatnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun										Kondisi Akhir Kinerja
				2020		2021	2022	2023	2024					
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,42	79,51	79,47	80,52	81,57	82,62	82,62				
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	indeks	Na	Na	70,80	70,80	70,90	71,00					
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk pertanian	Berkembangnya produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2			
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	indeks	87,9	87,9	88,2	84,9	85,0	85,1	85,1	85,1			
		Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	7.373,16	Na	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	8.875,03	8.875,03			
		Persentase kenaikan produksi pertanian/perkebunan	%	Na	Na	0	0,73	0,73	0,73	0,73	2,19			
		Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggul	%	Na	Na	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	13,6			

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan pangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang guna mewujudkan Kabupaten Magelang yang SEDAYA AMANAH.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian dan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pertanian dan pangan secara terinci pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)</p>			
<p>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Meningkatnya ketahanan pangan daerah</p>	<p>Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan</p>	<p>Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian</p>	<p>Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian</p>
		<p>Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>Ketersediaan informasi dan akses pangan</p>
			<p>Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi</p>
			<p>Tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai angka kecukupan gizi</p>
		<p>Menanggulangi kerawanan pangan Masyarakat</p>	<p>Penyusunan peta kerentanan pangan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten</p>
		<p>Belum Optimalnya pengawasan keamanan pangan</p>	<p>Peningkatan Pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan</p>

MISI II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk pertanian	Berkembangnya produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan
		Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian
		pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Meningkatkan pelayanan perizinan usaha pertanian	Pendampingan penerapan izin usaha pertanian
		Penguatan penyuluhan pertanian	Meningkatkan peran dan kapasitas penyuluh dalam pendampingan petani

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan pangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang guna mewujudkan Kabupaten Magelang yang SEDAYA AMANAH.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian dan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pertanian dan pangan secara terinci pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<p>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)</p>			
<p>MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia</p>			
<p>Tujuan</p> <p>Meningkatnya ketahanan pangan daerah</p>	<p>Sasaran</p> <p>Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan</p>	<p>Strategi</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian</p> <p>Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>Arah Kebijakan</p> <p>Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian</p> <p>Ketersediaan informasi dan akses pangan</p> <p>Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi</p> <p>Tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai angka kecukupan gizi</p>
	<p>Menanggulangi kerawanan pangan Masyarakat</p>	<p>Belum Optimalnya pengawasan keamanan pangan</p>	<p>Penyusunan peta kerentanan pangan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten</p> <p>Peningkatan Pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan</p>

MISI II : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk pertanian	Berkembangnya produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian
		Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
		Meningkatkan pelayanan perizinan usaha pertanian	Pendampingan penerapan izin usaha pertanian
		Penguatan penyuluhan pertanian	Meningkatkan peran dan kapasitas penyuluh dalam pendampingan petani

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan pada satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan pangan dan urusan pilihan pertanian.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2021-2024, adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 1. Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - 3) Sub Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - 5) Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - 2) Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - 3) Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

2. Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - 2) Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 3) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 1. Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 2. Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 3. Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 1. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan : Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Sub kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

- 5) Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pilihan Pertanian :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3) Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 3) Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3) Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 - 2) Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel
 - 4) Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 1. Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - 2) Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 2. Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
 - 2) Sub Kegiatan : Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - 3) Sub Kegiatan : Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 1. Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B
 - 2) Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

- 3) Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- 4) Sub Kegiatan : Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
2. Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - 2) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - 3) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - 4) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
 - 5) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
 - 6) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
 - 7) Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 1. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - 2) Sub Kegiatan : Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3) Sub Kegiatan : Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
 1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian
 1. Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - 2) Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.
 - 3) Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

- 4) Sub Kegiatan : Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- 5) Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Secara rinci rencana program dan kegiatan tahun 2019-2024 pada tabel 6.1 berikut ini :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTAMANAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kemangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2020			2021			2022			2023					2024		
					Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBC)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	Kebudayaan dan daerah	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Pengabdian Masyarakat Pangan		Indeks Kebahagiaan Pangan	79,42 angka (0-100)	0	0	79,47 angka (0-100)	900.764.221	81,30 angka (0-100)	1.752.000.000	81,57 angka (0-100)	1.669.000.000	80,82 angka (0-100)	3.377.000.000						
				Suku Pula Pangan Harapan (SPH) Ketahanan	Na %	0	0	Na %	900.764.221	70,80%	1.752.000.000	70,90%	1.669.000.000	71,00%	3.377.000.000						
				Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	Na %			Na %		90,20%		90,20%									
				Sektor Post Pangan Harapan (PPH) Komunitas	Na %			Na %		84,80%		85,00%									
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KERAMPOURAN PANGAN		Na %	0	0	Na %	0	100%	560.000.000	100%	560.000.000	100%	1.830.000.000						
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/MKota		Na paket		0	Na paket	0	3 paket	560.000.000	3 paket	560.000.000	3 paket	1.830.000.000						
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Na paket		0	Na paket	0	1 paket	250.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	1.000.000.000						
			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		Na paket		0	Na paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	200.000.000						
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		Na paket		0	Na paket	0	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	500.000.000						

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang terlaksana	10 kali	0	0	10 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	60.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG		
		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kabupaten Infrastruktur Perkebunan Kemandirian Pangan	jumlah dokumen rencana peta jalan Kabupaten Infrastruktur Perkebunan Kemandirian Pangan yang tersusun	1 dokumen	0	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	70.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah 2. Penguatan Cadangan Pangan 3. Ketersediaan energi per kapita 4. Ketersediaan protein per kapita	10 persen 10 persen 10 kali 10 gram	0	0	91 persen 65 persen 2000 liter 53 gram	914.000.000	91 persen 65 persen 2000 liter 53 gram	914.000.000	91 persen 65 persen 2000 liter 53 gram	914.000.000	91 persen 65 persen 2000 liter 53 gram	1.117.000.000						
		Penyediaan dan Penyulutan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Jumlah laporan analisis data informasi pasar disubstansi dan harga pangan strategis yang tersusun 2. Jumlah laporan analisis data informasi pasar disubstansi dan harga pangan strategis yang tersusun	10 dokumen 10 dokumen	0	0	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30.561.000	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30.561.000	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	30.561.000	3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	180.000.000						
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Rencana Bahan Makanan	1. Jumlah laporan analisis data informasi pasar disubstansi dan harga pangan strategis yang tersusun 2. Jumlah laporan analisis data informasi pasar disubstansi dan harga pangan strategis yang tersusun	10 dokumen 10 dokumen	0	0	1 dokumen 1 dokumen	30.561.000	1 dokumen 1 dokumen	30.561.000	1 dokumen 1 dokumen	30.561.000	1 dokumen 1 dokumen	70.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (subcom) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pelaksanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Pengembangan Kelangkaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang berkembang	15 LDPM	0	0	15 LDPM	30.000.000	0	30.000.000	15 LDPM	30.000.000	15 LDPM	50.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKAS	KABUPATEN MAGELANG		
		Pengembangan Kelangkaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelangkaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang berkembang	15 lembaga	0	0	15 lembaga	30.000.000	0	30.000.000	15 lembaga	30.000.000	15 lembaga	60.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKAS	KABUPATEN MAGELANG		
		Pengelolaan dan Kembangkan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan kabupaten yang terkumpul	1 paket	0	0	1 paket	200.000.000	0	300.000.000	1 paket	300.000.000	1 paket	375.000.000						
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan kabupaten	15 ton	0	0	25 ton	200.000.000	0	250.000.000	25 ton	250.000.000	25 ton	300.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKAS	KABUPATEN MAGELANG		
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan yang terpelihara	15 paket	0	0	1 paket	0	0	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	75.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKAS	KABUPATEN MAGELANG		
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang tersusun	15 dokumen	0	0	1 dokumen	686.866.770	0	522.000.000	1 dokumen	542.000.000	1 dokumen	562.000.000						
		Penyusunan dan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per kapita per Tahun	Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)	15 dokumen	0	0	1 dokumen	515.000.000	0	0	15 dokumen	0	15 dokumen	0			DINAS PERTANIAN DAN PANGKAS	KABUPATEN MAGELANG		
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pemaksimalan peningkatan yang terdapat 2. jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu BCSA 3. jumlah lomba festival pangan yang diadakan dan terdapat	15 kelompok	0	0	21 kelompok	184.866.770	0	460.000.000	21 kelompok	510.000.000	21 kelompok	530.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKAS	KABUPATEN MAGELANG		

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Penguasaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4. jumlah peserta pengembangan dibidang pangan lokal yang terdina	Na dibukun	Na	Na %	21 subpok	0	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	32.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KABUPATEN MAGELANG		
			jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi yang terusun	Na dibukun	0	Na %	1 dokumen	0	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	32.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KABUPATEN MAGELANG		
			penelitian daerah rendan risan pangan	Na %	0	Na %	17.00%	0	1 dokumen	37.000.000	16.50%	90.000.000	16.30%	100.000.000						
			Penyusunan Peta Ketersediaan dan Kelangkaan Pangan Kecamatan	Na dibukun	0	0	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	7.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	15.000.000						
			Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisa Peta Kelangkaan dan Ketersediaan Pangan	Na dibukun	0	0	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KABUPATEN MAGELANG		
			1. jumlah dokumen peta ketersediaan dan kelangkaan pangan yang terusun	Na dibukun	0	0	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	15.000.000						
			2. jumlah dokumen analisis SP3G yang terusun	Na dibukun	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0						
			Jumlah kawasan pangan yang terdapan	Na baik	0	0	Na baik	0	5 baik	30.000.000	5 baik	60.000.000	5 baik	85.000.000						
			1. Jumlah koordinasi penanganan kawasan pangan	Na baik	0	0	Na baik	0	4 kali	30.000.000	4 kali	35.000.000	4 kali	40.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KABUPATEN MAGELANG		
			2. jumlah dokumen peta ketersediaan dan kelangkaan pangan yang terusun	Na dibukun	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0						
			3. jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi yang terusun	Na dibukun	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	0						

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2020			2021			2022			2023			2024			Kendali Kinerja	Unit Kerja Perangkat Daerah Pemasangan Jambak	Lokasi
				TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	TARGET	Rp (MPPD)	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			5. jumlah dokumen Standar Pelayanan yang tersusun	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
			5. jumlah dokumen SOP yang tersusun	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen evaluasi retribusi yang tersusun	Na dokumen	0	0	1 dokumen	88.150.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	36.000.000	1 dokumen	36.000.000	36.000.000	1 dokumen	36.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PANGGAM	KABUPATEN MAGELANG	
			2. jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	1 dokumen	Na dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
			3. jumlah dokumen laporan kblulanan yang tersusun	Na dokumen	Na dokumen	Na dokumen	1 dokumen	Na dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	Na kegiatan	0	0	3 kegiatan	15.290.821.940	3 kegiatan	21.261.726.471	3 kegiatan	21.066.000.000	3 kegiatan	21.066.000.000	21.066.000.000	3 kegiatan	21.066.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PANGGAM	KABUPATEN MAGELANG	
			1. jumlah bulan penyediaan gpl dan suryangan ASN	Na bulan	Na bulan	Na bulan	14 bulan	15.340.821.940	14 bulan	21.171.726.471	14 bulan	21.000.000.000	14 bulan	21.000.000.000	21.000.000.000	14 bulan	21.000.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PANGGAM	KABUPATEN MAGELANG	
			2. jumlah bulan penyediaan gpl dan suryangan PPK	Na bulan	Na bulan	Na bulan	12 bulan	Na bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan				
		Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah kegiatan kepala perangkat daerah terkait pengicde keuangan	Na kegiatan	0	0	5 kegiatan	26.600.000	5 kegiatan	88.000.000	5 kegiatan	70.000.000	5 kegiatan	70.000.000	70.000.000	5 kegiatan	70.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PANGGAM	KABUPATEN MAGELANG	
			1. jumlah kegiatan yang terverifikasi	Na kegiatan	Na kegiatan	Na kegiatan	37 kegiatan	10.400.000	43 kegiatan	12.000.000	45 kegiatan	15.000.000	47 kegiatan	18.000.000	18.000.000	47 kegiatan	18.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PANGGAM	KABUPATEN MAGELANG	
			2. jumlah laporan keuangan yang tersusun	Na laporan	Na laporan	Na laporan	5 laporan	Na laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan		DINAS PERTANIAN DAN PANGGAM	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
				2020				2021				2022						2023				2024			
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Na dokumen	0	0	2 dokumen	0	2 dokumen	36.000.000	2 dokumen	36.000.000	2 dokumen	42.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Penyusunan Perencanaan Kelulusan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen penyusunan perencanaan kelulusan barang milik daerah SKPD yang tersusun	Na dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	14.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Revisi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen revisi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Na dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	14.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen pendataan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	Na dokumen	0	0	1 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	14.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	jumlah administrasi kependudukan perangkat daerah yang dilaksanakan	Na kegiatan	0	0	3 kegiatan	36.255.000	60.000.000	60.000.000	3 kegiatan	62.000.000	3 kegiatan	74.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kependudukan	1. jumlah ASN yang pindah 2. jumlah data kependudukan yang tersusun 3. jumlah PJ yang terbitasi pindah angka mudanya	Na orang	0	0	297 orang	38.255.000	40.000.000	40.000.000	297 orang	40.000.000	297 orang	50.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Monitoring, Evaluasi, dan Perlakuan Kinerja Pegawai	jumlah ASN yang terbitasi pindah fungsinya	Na orang	0	0	16 orang	0	10.000.000	10.000.000	251 orang	10.000.000	251 orang	10.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah kegiatan pembinaan ASN	Na tahun	0	0	1 tahun	0	10.000.000	10.000.000	1 tahun	12.000.000	1 tahun	14.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG							

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	14 kegiatan	0	0	2 kegiatan	128.000.000	2 kegiatan	128.000.000	2 kegiatan	128.000.000	2 kegiatan	229.000.000						
		Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	1. jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor 2. jumlah paket pengadaan peningkatan gedung kantor	14 paket	0	0	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000	10 paket	30.000.000	10 paket	50.000.000					KABUPATEN MAGELANG	
		Penyediaan Bahan Baku dan Pembelian Perantara	Jumlah jurnal buku yang terakumulasi	14 jurnal	0	0	14 jurnal	8.000.000	30 jurnal	8.000.000	30 jurnal	8.500.000	30 jurnal	9.000.000					KABUPATEN MAGELANG	
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	1. jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 2. jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana 3. jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	450 kali	0	0	450 kali	155.200.000	450 kali	90.000.000	450 kali	90.000.000	450 kali	150.000.000					KABUPATEN MAGELANG	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	36 kali	0	0	36 kali	0	36 kali	0	36 kali	0	36 kali	0					KABUPATEN MAGELANG	
		Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel yang dilaksanakan	32 kali	0	0	32 kali	0	32 kali	0	32 kali	0	32 kali	0					KABUPATEN MAGELANG	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang dilaksanakan	7 unit	0	0	7 unit	0	7 unit	0	7 unit	0	7 unit	0					KABUPATEN MAGELANG	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	27 unit	0	0	27 unit	0	27 unit	0	27 unit	36.000.000	27 unit	40.000.000					KABUPATEN MAGELANG	
				14 kegiatan	0	0	2 kegiatan	165.200.000	2 kegiatan	170.000.000	2 kegiatan	170.000.000	2 kegiatan	170.000.000					KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi (Rp)	Rp (APBD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Penyediaan Jasa Sural Menyurat	jumlah surat yang dikalsi	3700 surat	0	50.000.000	3700 surat	50.000.000	3700 surat	50.000.000	3700 surat	50.000.000	3700 surat	50.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pemenuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	0	539.200.000	12 bulan	115.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		Pembelajaran Berbagi Mitra Daerah	jumlah pembelajaran berbagi milk daerah yang terlaksana	- kegiatan	0	661.241.970	4 kegiatan	701.000.000	4 kegiatan	710.000.000	4 kegiatan	710.000.000	4 kegiatan	710.000.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara 2. jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	Na unit	0	559.616.660	106 unit	601.000.000	106 unit	601.000.000	106 unit	601.000.000	106 unit	601.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	1. jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara 2. jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	Na unit	0		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit							
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara 2. jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	Na unit	0		106 unit	0	106 unit	0	106 unit	600.000.000	106 unit	650.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		Pembelajaran Mobil	jumlah mobil yang terpelihara	0 unit	0		0 unit	0	16 unit	0	16 unit	10.000.000	16 unit	10.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		Pembelajaran Perawatan dan Mesin Lainnya	jumlah perlatan dan mesin lainnya yang terpelihara	38 unit	0	37.320.500	38 unit	30.000.000	38 unit	40.000.000	38 unit	40.000.000	38 unit	50.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		Pembelajaran/Rahibabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara / rehabilitasi	0 unit	0	64.302.560	23 unit	60.000.000	23 unit	60.000.000	23 unit	60.000.000	23 unit	60.000.000			DINAS PERTANIAN DAN PANGGARAN	KABUPATEN MAGELANG		
		PROGRAM PENTEGAMAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Na %	0	20.370.075.000	2,56%	1.813.596.150	2,56%	1.880.666.150	2,55%	1.840.566.150	2,55%	1.840.566.150						

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2020			2021			2022			2023			2024			Kendali Kinerja	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Programas Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pembinaan/ pengawasan kepada kelompok tani perencana sarana pendukung pertanian	1/ta paket	1/ta paket	0	1/ta paket	22.802.800.000	1/ta paket	1.680.566.150	1/ta paket	1.325.566.150	1/ta paket	1.480.566.150							
		Programas Penggunaan Sarana Peningkatan Perikanan sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesialis Lokasi	1. jumlah luas lahan pertanian jod organik yang diikuti (lapang) 2. jumlah kegiatan pembinaan petani Nembaku	0/ta	0/ta	0	660/ta	21.075.000.000	0/ta	566.000.000	0/ta	300.000.000	0/ta	366.000.000							
		Peningkatan Penggunaan Sarana Peningkatan Perikanan	1. jumlah bantuan pupuk tambak yang diserahkan ke kelompok tani 2. jumlah bibit lele yang diserahkan ke kelompok tani 3. jumlah pembinaan lahan petani Nembaku 4. jumlah pengadaan alat mesin perikanan yang diserahkan 5. jumlah pengadaan alat pasca panen tambak yang serahkan 6. jumlah bibit lele yang serahkan ke kelompok tani 7. jumlah bibit lele yang serahkan ke kelompok tani 8. jumlah bibit koi yang diserahkan ke kelompok tani	- kelompok - batang - kelompok - unit - unit	10 kelompok 7200 batang 4 kelompok 28 unit 10 unit	0	1.228.000.000	1.228.000.000	8 kelompok 6000 batang 4 kelompok 7 unit 8 unit	1.125.566.150	8 kelompok 6000 batang 4 kelompok 7 unit 8 unit	1.025.566.150	8 kelompok 5000 batang 4 kelompok 7 unit 8 unit	1.126.566.150							

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
				2020			2021			2022			2023					2024	
				Target	Realisasi	Rakalisasi (Rp)	Target	Rp (RPBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			9. jumlah luas lahan verifikasi organik tanaman perkebunan	0 Ha			24 Ha		24 Ha		24 Ha		24 Ha						
			10. jumlah sumber daya petani, tumbukan, dan Nilotis Organisme Kabupaten/Kota	0 varietas		0	2 varietas	465.275.000	2 varietas	300.000.000	2 varietas	335.000.000	2 varietas	2 varietas	365.000.000				
			11. jumlah layanan perikanan dan kesehatan SDG Hewan/Tanaman	- paket		0	1 paket	300.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	130.000.000	1 paket	1 paket	150.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	KABUPATEN MAGELANG	
			12. jumlah pembinaan penyuluh berbasis tanaman	- penyuluh			3 penyuluh		3 penyuluh		3 penyuluh		3 penyuluh		3 penyuluh				
			13. jumlah penyuluhan penyuluh berbasis tanaman	- penyuluh			2 penyuluh		2 penyuluh		2 penyuluh		2 penyuluh		2 penyuluh				
			14. jumlah kebun dinas yang dikelola	- kebun			1 kebun		1 kebun		1 kebun		1 kebun		1 kebun				
			15. jumlah pembinaan budidaya tanaman pangan yang terlindungi	- lahan		0	4 lahan	50.000.000	4 lahan	50.000.000	4 lahan	50.000.000	4 lahan	4 lahan	50.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	KABUPATEN MAGELANG	
			16. jumlah kebun dinas yang dikelola	- kebun dinas			1 kebun dinas		1 kebun dinas		1 kebun dinas		1 kebun dinas		1 kebun dinas				
			17. jumlah pembinaan penyuluh berbasis tanaman	- penyuluh			3 penyuluh		3 penyuluh		3 penyuluh		3 penyuluh		3 penyuluh				
			18. jumlah penyuluhan penyuluh berbasis tanaman	- penyuluh			2 penyuluh		2 penyuluh		2 penyuluh		2 penyuluh		2 penyuluh				
			19. jumlah pembinaan budidaya tanaman hortikultura yang terorganisasi	- lahan		0	4 lahan	75.345.000	4 lahan	153.000.000	4 lahan	155.000.000	4 lahan	4 lahan	150.000.000		DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			<p>2. jumlah penumbuhan, pengembangan, dan pendampingan usaha buah</p> <p>3. jumlah penyediaan sarana dan prasana tanaman agrikultur dan lahan holt lainnya</p>	- tidak		4 buku	4 buku		4 buku	4 buku	4 buku	4 buku	4 buku							
			1. Cakupn pelayanan sarana dan prasana pertanian	- paket		1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket							
			1. Cakupn pelayanan dan pengembangan prasarana pertanian	Na %		0	Na %	4.688.506.273	1,75%	29.002.000.000	1,75%	29.021.067.000	1,75%	33.360.000.000						
			2. Cakupn ketersediaan sarana dan prasana pertaniantertentu	Na %			3,56%		Na %		Na %	Na %	Na %							
			jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	- dokumen		0	- dokumen	35.000.000	7 dokumen	22.135.800.000	7 dokumen	24.703.400.000	7 dokumen	5.210.000.000						
			jumlah dokumen regulasi LP2B KP2B LCP2B yang tersusun	0 dokumen		0	0 dokumen	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000						
			jumlah dokumen peta lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B	0 dokumen		0	0 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000						
			1. jumlah pengelolan hibah / sensor yang terfasilitasi lainnya	- dana		0	372 dana	35.000.000	372 dana	21.955.600.000	372 dana	24.481.400.000	372 dana	5.000.000.000						

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	2020			2021			2022			2023			2024			Kendali Kinerja	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi																																																																														
				Target	Realisasi	Realisasi (Rp)	Target	Rp (APBD)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																																	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		Perbaikan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bata Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Bata Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	- BPP	0	0	3 BPP	2.250.000.000	3 BPP	1.871.200.000	3 BPP	1.612.667.000	3 BPP	2.000.000.000					DINAS PERTANIAN DAN PANGKON DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG																																																																															
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	- paket	0	0	1 paket	661.509.273	1 paket	3.000.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	700.000.000					DINAS PERTANIAN DAN PANGKON DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG																																																																															
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Na %	0	0	Na %	105.082.442	9,25 %	953.000.000	9,25 %	195.845.000	9,25 %	170.000.000																																																																																					
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	jumlah penanggulangan bencana pertanian kabupaten	Na Kecamatan	0	0	21 Kecamatan	101.082.442	21 Kecamatan	153.000.000	21 Kecamatan	166.845.000	21 Kecamatan	170.000.000																																																																																					
		Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) Turbunan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pengendalian OPT turbunan pangan dan penyakit tanaman	- paket	0	0	1 paket	65.844.542	1 paket	65.845.000	1 paket	65.845.000	1 paket	70.000.000						DINAS PERTANIAN DAN PANGKON DAN PANGKON	KABUPATEN MAGELANG																																																																														
		Peningkatan Dampak Persebaran Iktin (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah seruan iktin yang terlaksana	0 paket	0	0	0 paket	0	1 paket	20.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000																																																																																					
		Pencegahan, Pengendalian, dan Gergapan Uraha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. jumlah seruan Uraha Tanaman yang terlaksana 2. jumlah operasional brigade iktin yang terlaksana	- kali	0	0	4 kali	43.237.500	4 kali	67.155.000	4 kali	70.000.000	4 kali	70.000.000																																																																																					

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
				2020			2021			2022			2023					2024		
				Target	Realisasi (Rp)	Rp (APSD)	Target	Rp (APSD)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			<p>2. jumlah dokumen program penyuluhan yang tersusun</p> <p>3. jumlah sarana promosi/pemasaran produk pertanian yang tersedia</p>	- dokumen			- dokumen		22 dokumen		22 dokumen		22 dokumen							
			<p>1. jumlah sarana promosi/pemasaran produk pertanian yang tersedia</p> <p>2. jumlah pelepas sarana dan pelepas mata yang meningkat kapasitasnya</p>	- paket			- paket		1 paket		1 paket		1 paket							
			<p>1. jumlah Badan Usaha Milk Peletri (BUMP) yang ditumbuhkan dan dibentuk</p> <p>2. Jumlah pelepas sarana dan pelepas mata yang meningkat kapasitasnya</p>	- BUMP	0	0	- BUMP	0	1 BUMP	55.000.000	1 BUMP	55.000.000	1 BUMP	55.000.000						
			<p>1. jumlah bimtek pengolahan budidaya (SL GAP) dan pasca panen (SL GAP) tanaman pangan yang terlaksana</p> <p>2. jumlah bimtek pengolahan budidaya (SL GAP) dan pasca panen (SL GAP) hortikultura yang terlaksana</p> <p>3. jumlah bimtek pengolahan budidaya (SL GAP) dan pasca panen (SL GAP) tanaman perkebunan yang terlaksana</p>	- paket	0	0	- paket	0	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	50.000.000						
			Jumlah			0		48.400.561.879		55.663.333.621		55.571.007.150		40.792.596.156						

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana pembangunan Kabupaten Magelang berdasarkan pada RPJMD Perubahan 2019–2024 yang dijabarkan dalam berbagai program, diantaranya memuat pembangunan bidang pertanian dan pangan yang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja. Setiap tahunnya indikator kinerja diuraikan secara bertahap, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2019-2024. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada indikator RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama tahun 2019-2024 secara rinci akan disajikan dalam Tabel 7.1. dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun										Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024					
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Indeks	Na		Na	70,80	70,90	71,00	71,00				
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Indeks	Na		Na	84,90	85,00	85,10	85,10				
3.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	Na		Na	93,2	93,2	93,2	93,2				
4.	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan	%	Na		Na	0,73	0,73	0,73	0,73				
5.	Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan	%	Na		Na	3,40	3,40	3,40	3,40				

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Tahun								Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		2020		2021		2022		2023				2024	
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Cakupan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Na %	Na %	Na %	100%	100%	100%	100%	Distan dan Pangan				
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah Penguatan Cadangan Pangan	Na %	Na %	91%	91%	91%	91%	91%	Distan dan Pangan				
	Ketersediaan energi per kapita	Na kkal	Na kkal	2000 kkal	2000 kkal	2000 kkal	2000 kkal	2000 kkal	Distan dan Pangan				
	Ketersediaan protein per kapita	Na gram	Na gram	53 gram	53 gram	53 gram	53 gram	53 gram	Distan dan Pangan				
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Na %	Na %	Na %	17,00%	16,50%	16,00%	16,00%	Distan dan Pangan				
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Na persen	Na persen	90%	90%	90%	90%	90%	Distan dan Pangan				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	Na %	Na %	100%	100%	100%	100%	100%	Distan dan Pangan				
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Na %	Na %	100%	100%	100%	100%	100%	Distan dan Pangan				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Tahun								Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2020		2021	2022	2023	2024				
		Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Na %	Na %	Na %	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	Distan dan Pangan		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Na %	Na %	Na %	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	Distan dan Pangan		
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Na %	Na %	3,59%	Na %	Na %	Na %	Na %	Distan dan Pangan		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Na %	Na %	Na %	9,25 %	9,25 %	9,25 %	9,25 %	Distan dan Pangan		
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan perizinan usaha pertanian	Na %	Na %	Na %	100%	100%	100%	100%	Distan dan Pangan		
	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	Na %	Na %	37,6 %	40,01 %	42,15 %	44,5 %	44,5 %	Distan dan Pangan		

BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh *stakeholder*. Peran *stakeholder* penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, menilai/mengevaluasi kinerja serta dapat berperan langsung dalam pembangunan pertanian dan pangan.

Agar pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan maupun laporan lima tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut. Dari laporan lima tahunan tersebut dapat dilihat keberhasilan Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan visi dan misinya.

Upaya mewujudkan Visi Kabupaten Magelang "***Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Amanah***" tidaklah mudah dan hanya dapat terealisasi dengan tekad yang kuat dan integritas serta komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terkoordinasi dan sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada tingkat Rencana Kerja (Renja) masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian dan pangan. Program dan kegiatan dalam pencapaian target pelaksanaan Renstra 2019-2024 yang masih relevan dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan renstra berikutnya, sehingga masa transisi dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020 dapat menggunakan beberapa indikator kegiatan dalam renstra 2019-2024.

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam Perubahan Renstra 2019-2024 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Kota Mungkid,

2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG



Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660618 199703 1 004